



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Pw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Pw. tanggal 04 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2000, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dan 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Silumbu bin La Tega, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama La Fatia bin La Tesi dan La Awena bin La basia dengan maskawin berupa 45 ( empat puluh lima ) Boka (1 Boka = 24.000.,) = Rp. 1.080.000.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama sebagai berikut:

1. ANAK I, umur 6 tahun.

2. ANAK II, umur 4 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----  
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2000 di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Pw. oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 2 diperbaiki menjadi Pemohon I berstatus duda usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus janda usia 28 tahun;
- Bahwa petitum poin 2 dirubah tanggal nikah menjadi tanggal 05 Oktober 2000, dan yang lainnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan mertua Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi Lupa kapan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Silumbu bin La Tega;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama La Fatia bin La Tesi dan La Awena bin La Basia adapun maharnya berupa 45 (empat puluh lima) Boka (1 Boka = 24.000.) = Rp. 1.080.000.,
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan usia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda usia 28 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang bernama sebagai berikut:
  1. ANAK I, 6 tahun.
  2. ANAK II, 4 tahun.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah karena tidak tahu prosedurnya dan biaya minim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
- Bahwa Keperluan lainnya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Wolowa Baru, tempat tinggal di Kabupaten Buton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan ipar dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah lama tinggal bersama dalam satu rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
  - Bahwa wali nikah saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi nikah saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon I berstatus duda dan usia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi tidak tahu anak Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Karena tidak tahu prosedurnya dan biaya minim;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
  - Bahwa Keperluan lainnya diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa menunjuk penetapan sela Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Pw tanggal 7 September 2015 dan mengambil alih hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersebut yang tak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 April 2000 di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Silumbu bin La Tega, dengan maskawin berupa 45 ( empat puluh lima ) Boka (1 Boka = 24.000.,) = Rp. 1.080.000., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Fatia bin La Tesi dan La Awena bin La basia;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan usia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dan 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan sumpah pekengkap (*sepletoir*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I mengenai angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II tidak dapat menerangkan apa yang menjadi dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dinilai tidak dapat memenuhi kategori saksi yang melihat mendengar dan mengalami langsung sehingga saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menggantungkan penetapan ini dengan isi sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi I dan sumpah pelengkap ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 April 2000 di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Silumbu bin La Tega, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama La Fatia bin La Tesi dan La Awena bin La Basia dengan maskawin berupa 45 (empat puluh lima) Boka (1 Boka = 24.000.-) = Rp. 1.080.000.-;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى  
إِنْتِهَائِهَا**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 5 April 2000 di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON I) dengan Pemohon II ( PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2000 di Dusun Waulangi, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Sudirman M,S.HI sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahmini, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Sudirman M,S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya panggilan : Rp 100.000,00
  4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 191.000,00  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)